

KATALOG : 9302020.1274

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA TEBING TINGGI MENURUT PENGELUARAN

2018 - 2022

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TEBING TINGGI**

**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KOTA TEBING TINGGI
MENURUT
PENGELUARAN**

2018 - 2022



**Produk Domestik Regional Bruto
Kota Tebing Tinggi
Menurut Pengeluaran 2018 - 2022**

ISSN : 2655-1241

No. Publikasi : 12740.2305

Katalog : 9302020.1274

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xii + 79 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Dicetak oleh:

UD. Relasi

"Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik"

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran 2018 - 2022

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum	: Ir. Ida Suswati, M.Si
Penulis	: Saprianto, SE
Pengolah Data	: Saprianto, SE
Gambar Kulit	: Aisyah Haq Iriawan, SST
Infografis	: Aisyah Haq Iriawan, SST

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

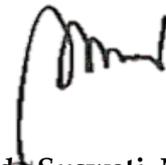
KATA PENGANTAR

Publikasi PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran 2018-2022 merupakan publikasi yang diterbitkan secara tahunan. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor serta Impor.

Kepada seluruh anggota tim penyusun publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga publikasi bisa membawa bermanfaat bagi pemerintah, pihak swasta, masyarakat, mahasiswa dan semua pihak yang memerlukannya. Adapun kritik dan saran demi perbaikan publikasi ini di masa depan akan selalu kami terima dengan baik.

Tebing Tinggi, April 2023
Kepala BPS Kota Tebing Tinggi,



Ir. Ida Suswati, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2. Kegunaan PDRB.....	4
II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	9
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRRT.....	12
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	17
2.5. Perubahan Inventori.....	21
2.6. Ekspor dan Impor Barang serta Jasa.....	24
III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA TEBING TINGGI BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN, 2018-2028.....	27
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran.....	29
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	35
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRRT	40
3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	41
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	43
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	46
3.7. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	47
3.8. Perkembangan Impor Barang dan Jasa	48
IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA TEBING TINGGI MENURUT PENGELUARAN 2018-2028.....	51
4.1. PDRB (Nominal)	53
4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	54

	Halaman
4.3. Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PMTB.....	55
4.4. Rasio Konsumsi Akhir terhadap PDRB	56
4.5. Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	57
4.6. Perbandingan PDRB terhadap Impor	58
4.7. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	59
4.8. Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	60
V PENUTUP	63
VI TABEL-TABEL	67
DAFTAR PUSTAKA	77

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

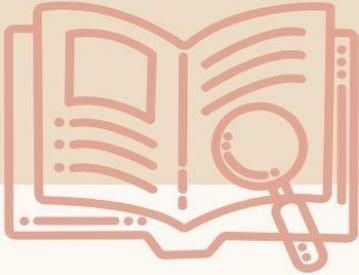
	Halaman
Tabel 3.1 PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022.....	30
Tabel 3.2 PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022.....	31
Tabel 3.3 Distribusi PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022.....	32
Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022.....	33
Tabel 3.5 Indeks Implisit PDRB ADHB Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022.....	35
Tabel 3.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	36
Tabel 3.7 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	37
Tabel 3.8 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	39
Tabel 3.9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	39
Tabel 3.10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	41
Tabel 3.11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	43
Tabel 3.12 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	44
Tabel 3.13 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	46
Tabel 3.14 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	47
Tabel 3.15 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	49
Tabel 4.1 PDRB dan PDRB Perkapita Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	53

Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Kota Tebing Tinggi Tahun 2018- 2022.....	55
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	56
Tabel 4.4	Rasio Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	57
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Tebing Tinggi ADHB Tahun 2018- 2022.....	58
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Tebing Tinggi Tahun 2018- 2022.....	59
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022.....	60
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022.....	61
Tabel 6.1	Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 2018-2022.....	69
Tabel 6.2	Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018-2022.....	70
Tabel 6.3	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2018-2022.	71
Tabel 6.4	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2018-2022.....	72
Tabel 6.5	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2018-2022.....	73
Tabel 6.6	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2018-2022.....	74
Tabel 6.7	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran (Persen), 2018-2022.....	75
Tabel 6.8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran, 2018-2022.....	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Perbandingan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022.....	32
Gambar 3.2 Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Beberapa Komponen Menurut Pengeluaran Tahun 2018–2022.....	34
Gambar 3.3 Kontribusi Sub Komponen PMTB Kota Tebing Tinggi Tahun 2018–2022.....	45
Gambar 3.4 Perubahan Inventori Kota Tebing Tinggi ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2018–2022.....	47
Gambar 3.5 Perkembangan Struktur Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi (ADHB), Tahun 2018–2022.....	50

PENDAPATAN DOMESTIK BRUTO KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022



6.931
Milyar Rupiah

PDRB ATAS
DASAR HARGA
KONSTAN



4.186
Milyar Rupiah

PDRB ATAS
DASAR HARGA
BERLAKU

B A B

1

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi, 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. Kegunaan PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.

4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

NILAI PDRB KOTA TEBING TINGGI ADHB MENURUT PENGELUARAN 2022



4.735 Milyar
PENGELUARAN
KONSUMSI
RUMAH TANGGA



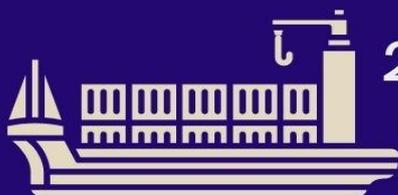
23,5 Milyar
PENGELUARAN
KONSUMSI LNPRT



1.178 Milyar
PENGELUARAN
KONSUMSI
PEMERINTAH



2.569 Milyar
PEMBENTUKAN
MODAL TETAP
BRUTO



2.882 Milyar
EKSPOR



4.537 Milyar
IMPOR



77,70 Milyar
PERUBAHAN
INVENTORI

B A B

2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. *Adjustment* dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Sebagai contoh : data hasil Survei Biaya Hidup (SBH) digunakan untuk *adjustment* kondisi rumah tangga di wilayah perkotaan.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun

2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) merupakan bagian dari pengeluaran lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit

institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PK-P Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P ADHB

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar - penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P ADHK

PK-P ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari PDRB komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
 - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengegalian (migas dan non-migas).
 - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
 - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
 - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi lokal (domestik) maupun dari produk luar daerah (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADHB atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADHK 2010, maka PMTB ADHB tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADHB maupun ADHK 2010.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-deflate PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikasikan PMTB ADHK 2010 dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK 2010 terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK 2010 tersebut di "reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK 2010 di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua*, untuk memperoleh PMTB ADHK 2010 adalah dengan cara men-deflate PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk ADHK 2010 diperoleh dengan men-deflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program

acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK 2010 diperoleh dengan cara mendeflate nilai ADHB dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5. Perubahan Inventori

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori

menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjenk Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori ADHK 2010, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir

dengan IHPB akhir tahun;

- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori ADHK 2010 dengan menginflasi perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK 2010 dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. Ekspor dan Impor Barang Serta Jasa

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor

impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

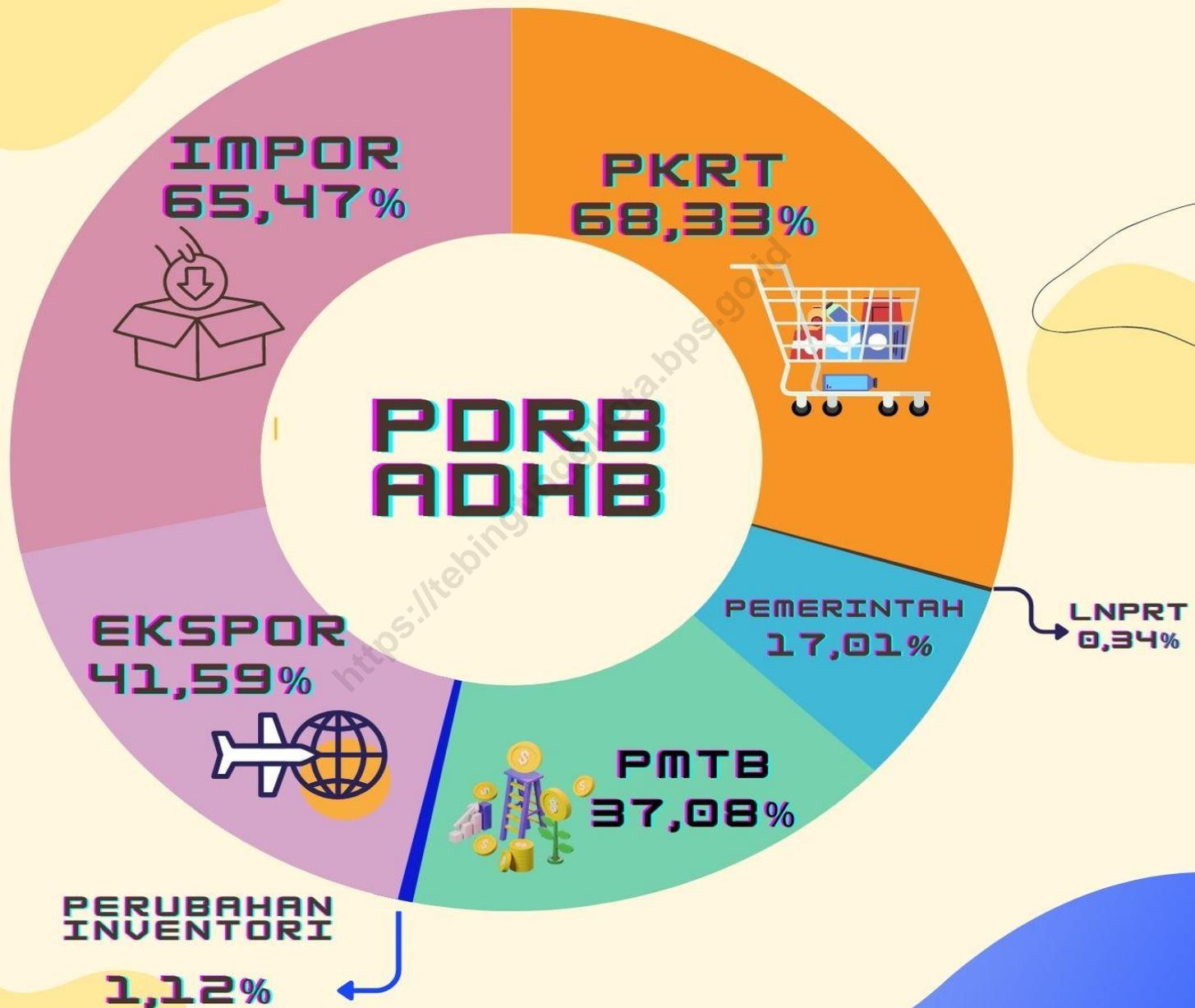
- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Import barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-import jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-import tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

DISTRIBUSI PDRB KOTA TEBING TINGGI MENURUT PENGELUARAN 2022



B A B

3

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA
TEBING TINGGI BERDASARKAN
PDRB PENGELUARAN 2018-2022**

Perubahan struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018 s.d 2022, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara itu, faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan sebagai akibat dinamika perdagangan global. Semenjak awal tahun 2020 hingga saat ini merebak wabah Covid-19 di seluruh bagian dunia dan akhirnya menjadi salah satu faktor eksternal utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam hal perekonomian di berbagai wilayah termasuk di Kota Tebing Tinggi.

Produk barang dan jasa yang tersedia di wilayah Kota Tebing Tinggi selama tahun 2018 s.d 2022 sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (baik itu rumah tangga, LNPRT, maupun pemerintah). Sebagian lainnya lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kajian atau analisis terhadap komponen-komponen PDRB, yaitu: konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT dan Pemerintah); Investasi (PMTB dan Inventori), dan net ekspor (ekspor dikurangi impor) tidak hanya dapat dilakukan dari arah perubahan struktur, tetapi juga dari sisi pertumbuhan.

Data menunjukkan bahwa setiap komponen PDRB mempunyai nilai yang berfluktuasi. Dalam analisis ekonomi makro, komponen tersebut juga sering digunakan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi atau prediksi perekonomian. Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen PDRB menurut pengeluaran tersebut akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Tinjauan Agregat PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran

Hingga tahun 2019, kondisi perekonomian Kota Tebing Tinggi menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut tercermin melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, serta pada pertumbuhan PDRB nya. Namun, pada tahun 2020 pemulihan tersebut dapat dikatakan tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan dampak negatif dari pandemi Covid-19 pada perekonomian global termasuk di Kota Tebing Tinggi .

PDRB dari sisi harga berlaku (ADHB) mencerminkan nilai yang dipengaruhi oleh perubahan harga serta perubahan volume. Sementara PDRB dari sisi harga konstan (ADHK 2010) dapat memberikan gambaran nilai PDRB tanpa ada pengaruh inflasi, atau dengan kata lain benar-benar menunjukkan perubahan PDRB hanya berdasarkan besarnya volume atau kuantitas saja. Oleh karena itulah, dalam mengukur pertumbuhan ekonomi secara riil, dihitung berdasarkan PDRB ADHK 2010.

**Tabel 3.1. PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB
Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 906 129,87	4 172 534,36	4 194 447,80	4 292 560,01	4 735 946,63
2. Konsumsi LNPRT	19 546,54	21 883,79	22 262,04	22 493,50	23 592,93
3. Konsumsi Pemerintah	1 095 195,32	1 115 194,88	1 120 310,45	1 175 180,01	1 178 814,65
4. PMTB	2 026 603,23	2 209 191,21	2 284 372,44	2 408 551,20	2 569 990,04
5. Perubahan Inventori	52 850,95	54 720,14	67 686,16	67 008,46	77 703,16
6. Ekspor	1 968 157,63	2 141 008,88	2 155 570,57	2 483 299,38	2 882 814,40
7. Impor	3 555 966,32	3 790 333,90	3 795 486,35	4 099 147,29	4 537 595,09
Total PDRB	5 512 517,21	5 924 199,35	6 049 163,10	6 349 945,28	6 931 266,73

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, nilai PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB selama periode tahun 2018 s.d 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2018, PDRB ADHB telah berhasil mencapai angka 5 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022 jumlah PDRB tersebut terus naik hingga mencapai 6 triliun rupiah atau lebih tepatnya Rp 6,93 triliun yang mana jika ditinjau menurut komponen pengeluaran, nilai PDRB tersebut disumbangkan oleh semua komponen baik itu konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, ekspor, maupun impor.

Sama halnya dengan PDRB ADHB, nilai PDRB ADHK 2010 di Kota Tebing Tinggi juga menunjukkan trend peningkatan yakni dari semula Rp 3,76 triliun pada tahun 2018 menjadi 4 triliun rupiah atau lebih tepatnya Rp 4,18 triliun pada tahun 2022. Nilai PDRB ADHK tersebut tampak meningkat dalam kurun waktu 2018 sd 2019, tetapi pada tahun 2020

mengalami penurunan kemudian pada tahun 2021 dan 2022 kembali meningkat. Dapat diketahui bahwa PDRB ADHK meningkat yakni dari semula Rp 4,02 triliun di tahun 2021 menjadi 4,19 triliun pada tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 setelah berkontraksi pada tahun 2020. Secara rinci, perkembangan nilai PDRB ADHK 2010 selama kurun waktu 2018–2022 di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2. PDRB Kota Tebing Tinggi
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Tahun 2018 - 2028**

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2 486 013,74	2 607 930,23	2 576 322,76	2 594 039,78	2 682 875,26
2. Konsumsi LNPRT	16 048,16	17 579,57	17 730,69	17 664,02	18 276,99
3. Konsumsi Pemerintah	624 135,80	625 956,60	623 159,34	641 157,01	632 571,83
4. PMTB	1 040 239,95	1 127 603,19	1 132 060,23	1 167 699,32	1 218 165,43
5. Perubahan Inventori	42 612,39	43 948,91	52 357,99	50 033,88	53 092,33
6. Ekspor	1 772 537,49	1 764 060,72	1 685 837,98	1 828 537,56	2 005 194,48
7. Impor	2 221 083,01	2 233 053,59	2 161 075,63	2 274 354,66	2 423 867,09
Total PDRB	3 760 504,52	3 954 025,63	3 926 393,36	4 024 776,92	4 186 309,23

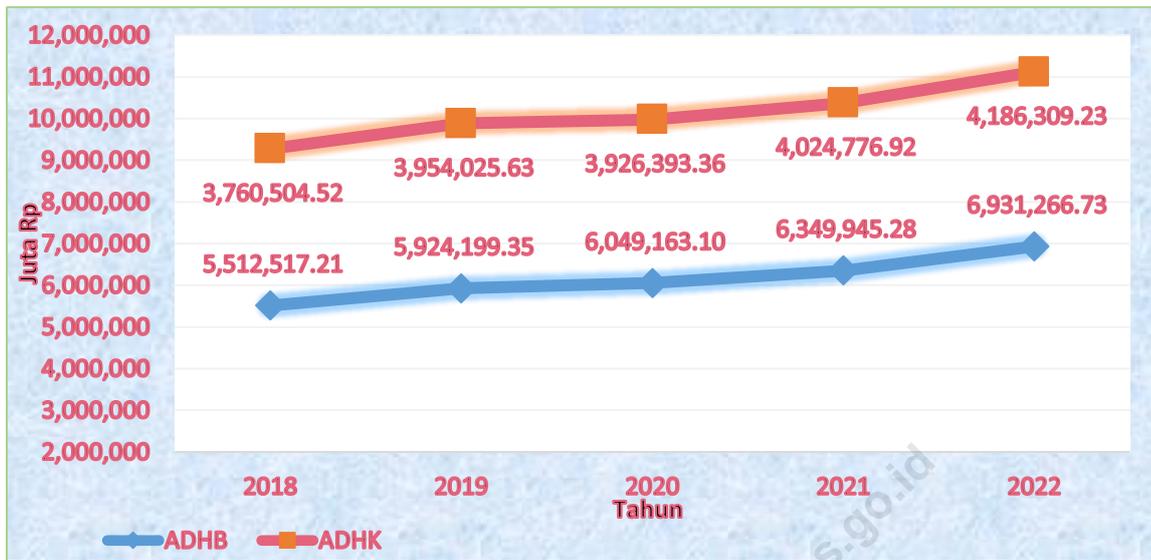
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK 2010. Perbedaan tersebut terjadi karena pada perhitungan PDRB ADHB masih adanya pengaruh perubahan kuantitas, dan juga ada pengaruh harga yang tercermin dari keterlibatan faktor inflasi. Sementara dalam perhitungan PDRB ADHK 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Gambar 3.1 berikut ini menunjukkan perbandingan nilai PDRB Kota Tebing Tinggi secara ADHB maupun ADHK 2010 selama periode 2018 sampai 2022.

**Gambar 3.1. Perbandingan PDRB Kota Tebing Tinggi
ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022**



Sumber : BPS KotaTebing Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.3 berikut terlihat bahwa selama periode 2018 - 2022, produk domestik regional bruto di wilayah Kota Tebing Tinggi sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga yang besarnya di sekitar 68,33 persen. Selain itu, produk yang digunakan untuk ekspor juga bernilai cukup besar yakni sekitar 41,59 persen, meskipun nilai tersebut masih lebih kecil dibandingkan nilai impor yang berkisar di nilai 65,47 persen pada tahun 2022.

**Tabel 3.3. Distribusi PDRB Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut
Pengeluaran Tahun 2018 - 2022**

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	70,86	70,43	69,34	67,60	68,33
2. Konsumsi LNPRT	0,35	0,37	0,37	0,35	0,34
3. Konsumsi Pemerintah	19,87	18,82	18,52	18,51	17,01
4. PMTB	36,76	37,29	37,76	37,93	37,08
5. Perubahan Inventori	0,96	0,92	1,12	1,06	1,12
6. Ekspor	35,70	36,14	35,63	39,11	41,59
7. Impor	64,51	63,98	62,74	64,55	65,47
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS KotaTebing Tinggi

Pada sisi lain, pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar, yakni kontribusinya sekitar sepertiga dari total PDRB (pada tahun 2022 sendiri kontribusinya mencapai 37,08 persen). Sementara itu, selama tahun 2018-2028 proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 17 hingga 19 persen dimana pada tahun 2022 ini yakni hanya 17,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik juga cukup besar walau tidak sebesar konsumsi komponen lain yang sudah disebutkan sebelumnya.

Pada tahun 2018 - 2022, perdagangan antar daerah dengan Kota Tebing Tinggi yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor. Kecenderungan perdagangan antar daerah dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi minus atau dengan kata lain lebih banyak barang/produk yang masuk dari luar daerah dibanding barang/produk yang dengan diekspor ke luar daerah oleh Kota Tebing Tinggi.

**Tabel 3.4. Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022**

Komponen Pengeluaran	(persen)				
	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,16	4,90	-1,21	0,69	3,42
2. Konsumsi LNPRT	5,18	9,54	0,86	-0,38	3,47
3. Konsumsi Pemerintah	6,52	0,29	-0,45	2,89	(1,34)
4. PMTB	8,40	8,40	0,40	3,15	4,32
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	9,58	-0,48	-4,43	8,46	9,66
7. Impor	9,45	0,54	-3,22	5,24	6,57
Total PDRB	5,17	5,15	-0,70	2,51	4,01

^{*)} Angka Sementara

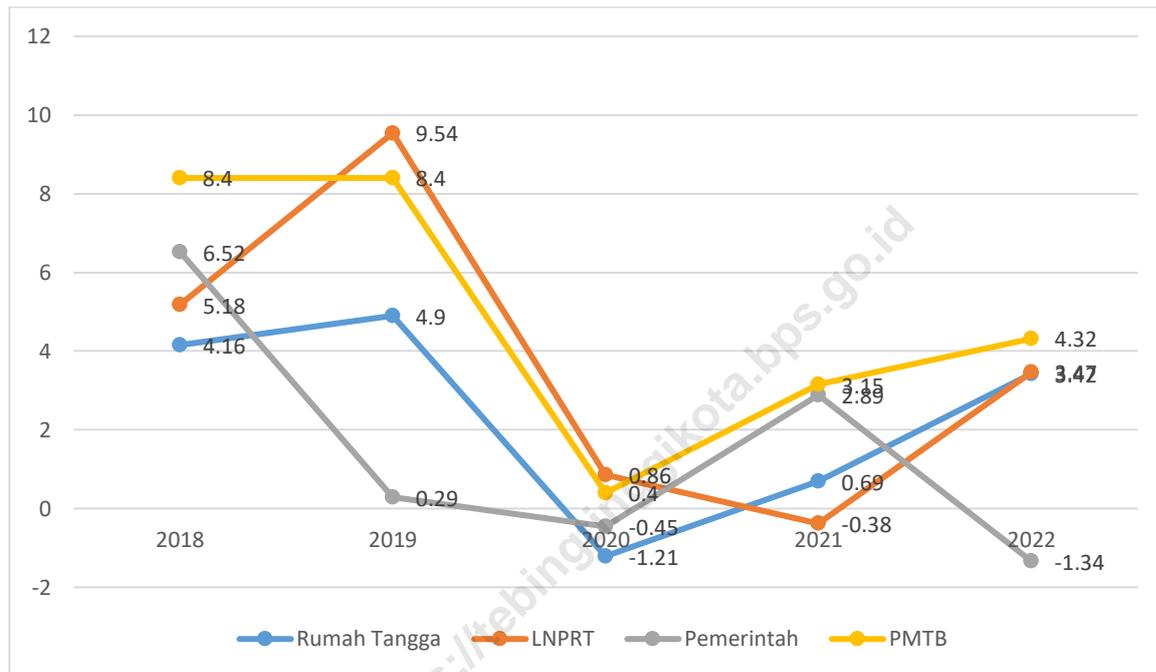
^{**)} Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang dapat menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut di Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2018 s.d 2019 mengalami fluktuasi (berubah). Pada tahun 2019 dimana terjadi sedikit perlambatan menjadi 5,15 persen dibanding tahun sebelumnya (5,17 persen), kemudian tahun 2020 mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sebesar -0,70 persen. Kemudian pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mengalami akselerasi

sebesar 2,51 persen, dan pada tahun 2022 kembali tumbuh positif sebesar 4,01 persen. Walaupun pertumbuhan tersebut belum sebesar tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19, tetapi hal tersebut telah mengisyaratkan adanya pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19. Secara rinci, informasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 .

Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Beberapa Komponen Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Gambar. 3.2 di atas menggambarkan laju pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi yang dirinci berdasarkan beberapa komponen pengeluarannya. Terlihat bahwa setiap komponen cenderung mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Namun demikian, secara umum di tahun 2022 hampir semua komponen tersebut mengalami akselerasi .

Sementara itu, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.5 berikut memperlihatkan bahwa pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar daerah), terjadi peningkatan perubahan harga. Secara akumulatif, indeks implisit PDRB tahun 2022 adalah 165,57 yang meningkat jika dibandingkan indeks implisit tahun sebelumnya yakni 157,77.

**Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB ADHB Kota Tebing Tinggi
Menurut Pengeluaran Tahun 2018 - 2022**

(persen)					
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	157,12	159,99	162,81	165,48	176,53
2. Konsumsi LNPRT	121,80	124,48	125,56	127,34	129,09
3. Konsumsi Pemerintah	175,47	178,16	179,78	183,29	186,35
4. PMTB	194,82	195,92	201,79	206,26	210,97
5. Perubahan Inventori	124,03	124,51	129,28	133,93	146,35
6. Ekspor	111,04	121,37	127,86	135,81	143,77
7. Impor	160,10	169,74	175,63	180,23	187,20
Total PDRB	146,59	149,83	154,06	157,77	165,57

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

3.2.

Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Data-data sebelumnya menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor yang ada di Kota Tebing Tinggi digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Berdasarkan Tabel 3.6, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2018 - 2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan secara nominal (ADHB). Namun, jika faktor inflasi dihilangkan (ADHK) tampak bahwa nilai konsumsi rumah tangga justru menurun. Diindikasikan salah satu penyebab utamanya adalah pandemi *Covid-19* yang membuat daya beli penduduk menurun.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018 hingga 2019 selalu lebih dari 70 persen. Adapun pada tahun 2020 -2021 porsinya sedikit menurun menjadi 69,34 persen dan 67,60 persen dari seluruh PDRB menurut pengeluaran di Kota Tebing Tinggi. Pasca krisis ekonomi tahun 1998/1999, pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya. Peningkatan penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor), juga turut menjadi pendorong

meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk dalam hal ini konsumsi rumah tangga. Namun pemulihan tersebut tidak dapat terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 yang begitu mempengaruhi pola konsumsi penduduk.

Tabel 3.6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	3 906 129,87	4 172 534,36	4 194 447,80	4 292 560,01	4 735 946,63
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	2 486 013,74	2 607 930,23	2 576 322,76	2 594 039,78	2,682,875.26
Porsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,86	70,43	69,34	67,60	68,33
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	100 528,36	106 195,68	101 957,94	102 653,53	
b. ADHK 2010	63 980,18	66 374,75	62 624,83	62 034,62	
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	24 025,75	25 247,08	24 367,34	25,533.26	26,638.62
b. ADHK 2010	15 290,92	15 780,01	14 966,96	14 825,71	15,090.56
Pertumbuhan (ADHK)					
a. Total konsumsi RT	4,16	4,90	-1,21	0,69	3,42
b. Per rumah tangga	2,94	3,74	-5,65	-0,94	
c. Perkapita	2,94	3,20	-5,15	-0,94	1,79
Jumlah rumah tangga (unit)	38 856	39 291	41 139	41 816	
Jumlah penduduk (orang)	162 581	165 268	172 134	174 969	177,785

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Secara umum, nilai rata-rata konsumsi per rumah tangga ADHB pada tahun 2022 mengalami peningkatan, begitu juga dengan ADHK 2010 nilai tersebut mengalami peningkatan. Atas dasar harga berlaku, pada tahun 2022 secara umum rumah tangga di Kota Tebing Tinggi menghabiskan dana sekitar Rp 102,65 juta rupiah dalam setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran untuk konsumsi tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yakni Rp 101,96 juta per rumah tangga.

Sementara itu, berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga selama periode 2018 s.d 2022 tumbuh secara fluktuatif. Selama kurun waktu tersebut, pertumbuhan tertinggi sempat terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 3,74 persen. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2021, rata-rata pertumbuhan konsumsi per rumah tangga mengalami penurunan hingga -5,65 persen tahun 2020 dan -0,94 persen pada tahun 2021.

Ditinjau dari sisi per kapita, rata-rata konsumsi mengalami peningkatan secara ADHB, yakni Rp 25,53 juta pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp 26,63 juta pada tahun 2022. Adapun jika ditinjau secara ADHK 2010, nilai yang dicatatkan oleh pengeluaran rata-rata konsumsi perkapita ini menalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni dari Rp 14,82 juta per kapita di tahun 2021 menjadi Rp 15,09 juta per kapita di tahun 2022. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya daya beli untuk konsumsi per kapita mulai meningkat sebagaimana yang juga terjadi pada level rumah tangga.

**Tabel 3.7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Kelompok Konsumsi	(persen)				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	61,24	61,21	62,25	62,57	63,09
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,21	1,20	1,24	1,25	1,22
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tang-ga	8,67	8,69	8,66	8,62	8,20
d. Kesehatan & Pendidikan	3,42	3,45	3,46	3,43	3,20
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	19,48	19,59	18,81	18,53	18,77
f. Hotel dan Restoran	4,83	4,77	4,51	4,54	4,45
g. Lainnya	1,14	1,09	1,07	1,08	1,07
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Pengeluaran untuk konsumsi penduduk dan rumah tangga dapat dirinci lagi yakni menjadi pengeluaran untuk Makanan, Minuman, dan Rokok; Pakaian dan Alas Kaki; Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; Kesehatan & Pendidikan; Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya; Hotel dan Restoran; dan pengeluaran Lainnya. Secara rinci, struktur konsumsi menurut jenis subkomponen pengeluaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7.

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, kontribusi konsumsi makanan, minuman dan rokok terhadap total konsumsi adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi lainnya (nonmakanan). Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode 2018 hingga 2022 selalu tercatat lebih dari 60 persen walaupun besarnya fluktuatif. Jika dilihat data terakhir yakni pada tahun 2022, tercatat bahwa 63,09 persen konsumsi masyarakat di Kota Tebing Tinggi adalah untuk makanan, minuman, dan rokok. Persentase ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 62,57 persen.

Pola proporsi konsumsi dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa hanya ada pergeseran yang relatif kecil antara pengeluaran bagi kebutuhan rumah tangga untuk makanan dengan kebutuhan rumah tangga untuk nonmakanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan nonmakanan sebenarnya tetap menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Yang dimaksud untuk pengeluaran nonmakanan tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Masih berdasarkan tabel 3.7 di atas terlihat bahwa selama masa pandemi sejak tahun 2020, pengeluaran rumah tangga untuk Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga; untuk Kesehatan dan Pendidikan, Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya; tercatat mengalami penurunan. Adapun yang tampak mengalami peningkatan adalah pengeluaran masyarakat untuk Pakaian dan Alas Kaki, Hotel dan Restoran serta untuk lainnya .

Dilihat dari pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk berbagai kelompok pengeluaran mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun secara umum di tahun 2022 ini pada seluruh kategori pengeluaran rumah tangga terjadi percepatan (akselerasi) pertumbuhan. Bahkan pada kategori pengeluaran Hotel dan restoran; Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya; Makanan minuman dan rokok ; Pakaian dan alas kaki mengalami akselerasi yang cukup tinggi pada tahun 2022.

Pola pertumbuhan “riil” tersebut menunjukkan bahwa perekonomian telah berangsur pulih dari hantaman pandemi Covid-19 dan berbagai faktor pendukung lainnya telah begitu dahsyat membawa perubahan pada konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) sejak tahun 2020 khususnya di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 3.8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022

(persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,90	5,38	0,15	0,85	3,64
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,29	2,69	-0,38	0,63	3,47
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,82	1,53	0,40	0,31	1,88
d. Kesehatan & Pendidikan	1,71	1,44	-0,52	0,40	0,93
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7,10	6,59	-4,53	0,66	3,39
f. Hotel dan Restoran	3,24	3,47	-6,31	-0,06	4,63
g. Lainnya	2,98	0,76	-3,20	0,18	3,84
Total Konsumsi	4,16	4,90	-1,21	0,69	3,42

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Adapun untuk data tingkat perubahan harga secara implisit disajikan pada berikut.

Tabel 3.9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022

(persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,01	1,31	2,07	1,99	7,35
b. Pakaian dan Alas Kaki	7,55	3,52	4,11	2,37	4,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,18	5,42	-0,18	1,51	3,12
d. Kesehatan & Pendidikan	2,91	6,32	1,30	1,03	1,83
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	1,65	0,77	1,10	0,15	8,11
f. Hotel dan Restoran	2,46	1,97	1,43	2,88	3,36
g. Lainnya	-0,39	0,79	2,28	2,78	5,84
Total Konsumsi	3,49	1,83	1,76	1,64	6,68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Tabel 3.9 memberi informasi bahwa adanya fluktuasi di setiap tahunnya pada pertumbuhan implisit (indeks harga) pada tiap-tiap subkomponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sejak tahun 2018 hingga 2022, secara total harga pada konsumsi rumahtangga mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 kelompok yang mengalami kenaikan harga tertinggi adalah kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya, berikutnya kelompok makanan, minuman dan rokok .

3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB Menurut Pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian masih belum signifikan dan masih berpeluang untuk ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan bahwa proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB cukup kecil bahkan tidak mencapai 1 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 proporsinya adalah 0,37 persen, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 proporsinya masing masing sebesar 0,35 persen dan 0,34 persen. Peranan konsumsi LNPRT secara proporsi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Bila dilihat dari harga konstan 2010 (ADHK 2010), secara umum nilai konsumsi untuk LNPRT dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan yakni, dari Rp 16,05 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 18,28 milyar pada tahun 2022. Namun pada tahun 2021 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 17,66 milyar jika dibandingkan tahun 2020. Faktor pandemi Covid-19 juga mempengaruhi aktivitas dari LNPRT karena adanya pembatasan aktivitas di masyarakat .

Adapun menurut harga berlaku (ADHB), juga terjadi peningkatan nilai dari tahun ke tahun sejak periode 2018 hingga 2022. Konsumsi kelompok LNPRT menurut harga berlaku (ADHB) pada tahun 2018 adalah Rp19,55 miliar kemudian menjadi Rp 23,59 miliar di tahun 2022. Aktivitas LNPRT bisa dikatakan sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang berskala nasional maupun lokal seperti pesta demokrasi pemilihan presiden/ wakil presiden, pemilihan legislatif nasional maupun daerah, pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/ kota. Pada saat itu banyak LNPRT seperti partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi olahraga dan budaya dan organisasi LNPRT lainnya yang melakukan aktivitas ke masyarakat, dan tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap besaran konsumsi yang dilakukan oleh LNPRT secara

keseluruhannya dan akan tergambar pada pengeluaran konsumsi LNPRT pada PRDB menurut pengeluaran.

**Tabel 3.10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	19 546,54	21 883,79	22 262,04	22 493,50	23 592,93
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	16 048,16	17 579,57	17 730,69	17 664,02	18,276.99
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,35	0,37	0,37	0,35	0,34
Pertumbuhan	5,18	9,54	0,86	-0,38	3,47

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

3.4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Selain konsumsi akhir rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), konsumsi akhir pemerintah juga merupakan pembentuk dari total konsumsi akhir di dalam perekonomian suatu wilayah. Pengeluaran konsumsi pemerintah sendiri tersusun dari pengeluaran konsumsi individu dan pengeluaran konsumsi kolektif.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas. Sedangkan contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan jasa keamanan yang dilakukan Kepolisian. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Tebing Tinggi sekaligus perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara ADHB sebesar Rp 1,09 triliun dan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 1,18 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara dari sisi atas dasar harga konstan

(ADHK 2010), pengeluaran konsumsi pemerintah ini juga menunjukkan pola peningkatan yang sama hingga tahun 2019 akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2020 (dari semula Rp 625,96 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 623,16 miliar di tahun 2020), kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 641,16 miliar dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 632,57 miliar .

Jika dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap total PDRB sejak tahun 2018 s.d tahun 2022 membentuk pola yang fluktuatif. Pengeluaran konsumsi pemerintah dari tahun 2018 ke tahun 2022 proporsinya terlihat cenderung menurun. Pada tahun 2018 proporsinya sebesar 19,87 persen, dan pada tahun 2019 sedikit turun menjadi 18,82 persen.

Kondisi ini terus berlanjut samapi dengan tahun 2022 yakni berturut-turut menjadi 18,52 pada tahun 2020, kemudian menjadi 18,51 persen pada tahun 2021 dan terakhir menjadi 17,01 persen pada tahun 2022 terhadap total PDRB di Kota Tebing Tinggi. Penurunan besarnya kontribusi konsumsi pemerintah ini terhadap total PDRB sejalan dengan penurunan nilai pertumbuhannya.

Sempat tumbuh hingga sebesar 6,52 persen pada tahun 2018, akan tetapi pada akhirnya total konsumsi pemerintah melambat dengan sangat drastis menjadi 0,29 persen saja pada tahun 2019 bahkan pada tahun 2020 terkontraksi menjadi -0,45 persen. Angka tersebut tercatat sebagai nilai pertumbuhan terkecil sepanjang beberapa tahun belakangan. Perihal ini diduga terjadi karena jumlah pegawai di Kota Tebing Tinggi yang berkurang, pengurangan tersebut dimulai pada periode 2017 dan 2018 .

Dapat dilihat pada Tabel 3.11 bahwa pada tahun 2018 ada sebanyak 2.854 pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi. Pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi fluktuasi jumlah pegawai pada pemko Tebing Tinggi. Salah satu penyebab penurunan jumlah pegawai ini di antaranya karena kebijakan peraturan pemerintah yang merubah status guru-guru SMA/Sederajat tidak lagi berada dibawah kewenangan pemerintah kota dalam hal ini pemko Tebing Tinggi, melainkan pegawai pemerintah provinsi (Pemprov). Dengan berkurangnya jumlah pegawai ini maka diduga mempengaruhi pertumbuhan dari total nilai belanja/ konsumsi pemerintah.

Penurunan dan perlambatan pertumbuhan pengeluaran pemerintah ini seringkali dikaitkan dengan cakupan layanan, dimana biasanya semakin sedikit pengeluaran pemerintah maka semakin kecil pula peluangnya dalam membiayai pelayanan terhadap masyarakat (baik dengan langsung maupun tidak langsung). Selain itu, nilai pengeluaran ini

adalah salah satu pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintahnya.

Tabel 3.11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1 095 195,32	1 115 194,88	1 120 310,45	1 175 180,01	1 178 814,65
ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	624 135,80	625 956,60	623 159,34	641 157,01	632 571,83
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	19,87	18,82	18,52	18,51	17,01
Konsumsi Pemerintah per kapita (Ribu Rp)					
ADHB	6 736,31	6 747,80	6 508,36	6 716,50	6,630.56
ADHK 2010	3 838,92	3 787,52	3 620,20	3 664,40	3,558.07
Konsumsi Pemerintah per pegawai pemerintah (Ribu Rp)					
a. ADHB	383 740,48	396 020,91	421 803,63	430 311,25	418,910.68
b. ADHK 2010	218 688,09	222 285,72	234 623,25	234 770,05	224,794.54
Pertumbuhan					
Total konsumsi pemerintah	6,52	0,29	-0,45	2,89	(1.34)
Konsumsi perkapita	5,28	-1,34	-4,42	1,22	(2.90)
Konsumsi per pegawai	12,53	1,65	5,55	0,06	(4.25)
Jumlah Pegawai Pemerintah	2 854	2 816	2 656	2 731	2,814
Jumlah penduduk (000 orang)	162 581	165 268	172 134	174 969	177,785

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Nilai pengeluaran konsumsi pemerintah Kota Tebing Tinggi perpegawai menunjukkan adanya penurunan nilai di tahun 2022 jika ditinjau dari segi ADHB maupun ADHK 2010. Demikian pula halnya pada pengeluaran pemerintah perkapita dimana secara ADHB maupun ADHK 2010 nilainya juga mengalami penurunan .

Jika dihitung pertumbuhan di masing-masing kategori, pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2019 dan 2020 secara perkapita mengalami kontraksi (tumbuh negatif), sedangkan secara perpegawai tumbuh positif. Secara detail nilainya yakni dari semula -1,34 persen di tahun 2019 menjadi -4,42 persen di tahun 2020 kemudian pada tahun 2021 tumbuh positif sebesar 1,22 persen dan pada tahun 2022 kembali tumbuh negatif -2,90 persen .

3.5.

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 3.12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	2 026 603,23	2 209 191,21	2 284 372,44	2 408 551,20	2 569 990,04
b. ADHK (Juta Rp)	1 040 239,95	1 127 603,19	1 132 060,23	1 167 699,32	1 218 165,43
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	36,76	37,29	37,76	37,93	37,08
Struktur PMTB					
a. Bangunan (Juta Rp)	1 667 179,55	1 816 964,75	1 864 741,23	1 967 030,78	2 088 734,63
%	82,26	82,25	81,63	81,67	81,27
b. NonBangunan (Juta Rp)	359 423,68	392 226,46	419 631,21	441 520,42	481 255,41
%	17,74	17,75	18,37	18,33	18,73
Total PMTB (Juta Rp)	2 026 603,23	2 209 191,21	2 284 372,44	2 408 551,20	2 569 990,04
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	9,93	8,51	-0,33	2,79	4,32
b. Non Bangunan	2,01	7,88	3,67	4,70	4,34
Total PMTB	8,40	8,40	0,40	3,15	4,32

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

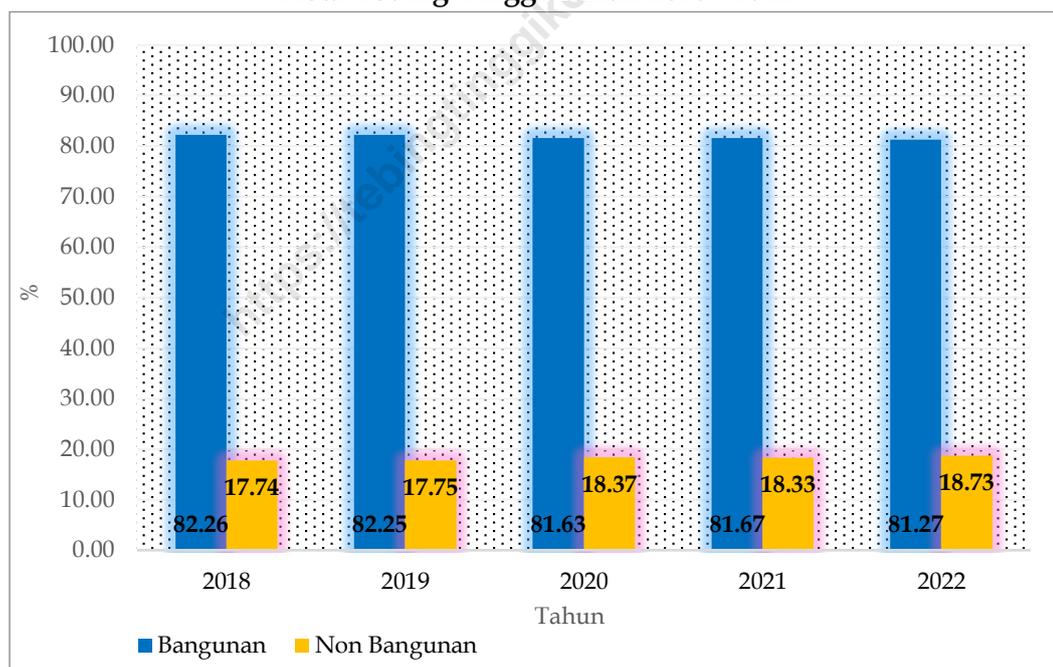
Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Tabel 3.12, dapat diketahui bahwa nilai PMTB di Kota Tebing Tinggi menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Adapun dari segi pertumbuhan PMTB secara keseluruhannya, dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022

terjadinya trend perlambatan yakni dari 8,40 persen pada tahun 2018 menjadi 4,32 persen pada tahun 2022. Adapun pertumbuhan PMTB di masing-masing komponennya (bangunan dan nonbangunan) nilainya cukup bervariasi antar tahun.

Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sejak tahun 2018 sampai tahun 2022, proporsi subkomponen bangunan terhadap total PMTB mencapai lebih 80 persen dimana tahun 2018 proporsinya sebesar 82,96 persen dan pada tahun 2022 sebesar 81,27 persen. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhannya. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2018 adalah 9,93 persen kemudian mengalami perlambatan tumbuh hingga menjadi 8,51 persen pada tahun 2019 akan tetapi di tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -0,33 persen. Kemudian pada tahun 2022 komponen bangunan tersebut kembali tumbuh positif sebesar 4,32 persen.

Gambar 3.3. Kontribusi Sub Komponen PMTB Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Berbanding terbalik dengan sub komponen bangunan, kontribusi subkomponen nonbangunan terhadap total PMTB sharenya lebih kecil. Pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 17,74 persen, kemudian terus meningkat hingga hanya menjadi 18,73 persen pada tahun 2022. Pergeseran proporsi ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 terjadi pergeseran struktur PMTB di Kota Tebing Tinggi dimana pembentukan modal tetap untuk komponen nonbangunan menjadi meningkat. Perkembangan kontribusi PMTB di masing-

masing komponennya selama kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada ilustrasi Gambar 3.3 diatas .

3.6. Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif dapat diartikan sebagai penambahan persediaan, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan.

Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori hanya dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB Kota Tebing Tinggi pada umumnya mempunyai besaran yang kecil dan berfluktuasi.

**Tabel 3.13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	52 850,95	54 720,14	67 686,16	67 008,46	77 703,16
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	42 612,39	43 948,91	52 357,99	50 003,88	53 092,33
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,96	0,92	1,12	1,02	1,12

*) Angka Sementara

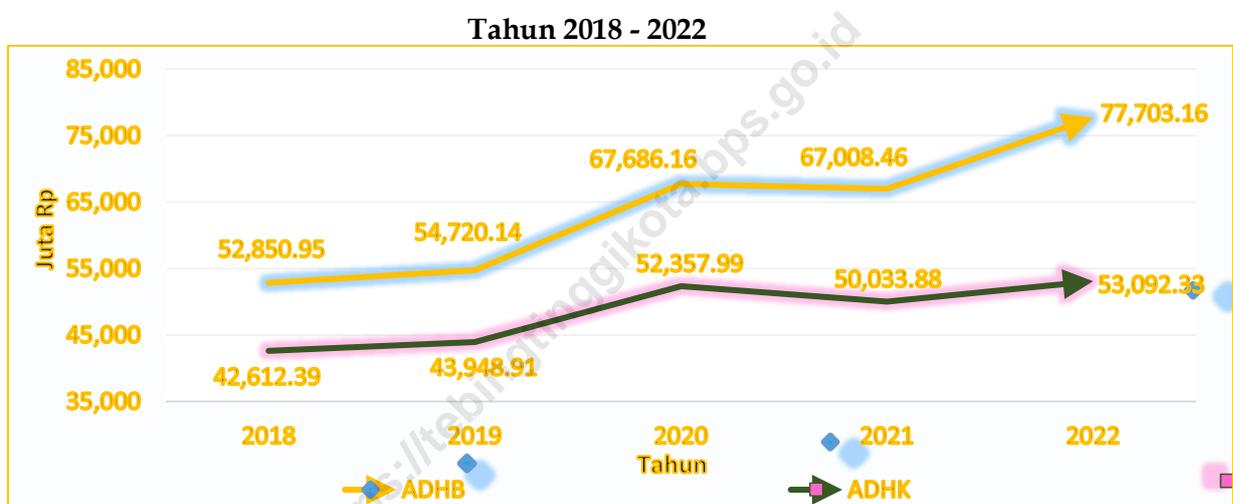
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2018, nilai perubahan inventori diketahui yakni sebesar Rp 52,85 miliar. Nilai tersebut setara dengan 0,96 persen dari total PDRB di

Kota Tebing Tinggi. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB ini selanjutnya terus naik hingga tahun 2022. Kemudian di tahun 2019 sempat mengalami penurunan sedikit. Pada tahun 2020, nilai perubahan inventori kembali naik kontribusinya bahkan hingga mencapai lebih dari 1 persen terhadap total PDRB yakni menjadi 1,12 persen atau setara Rp 67,69 miliar. Namun demikian nilai tersebut kembali turun pada tahun 2021 menjadi 67,01 miliar atau setara 1,02 persen dan pada tahun 2022 naik kembali menjadi 1,12 persen dari total PDRB Kota Tebing Tinggi. Ilustrasi perkembangan nilai perubahan inventori tersebut sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 baik ADHB maupun ADHK dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut.

Gambar 3.4. Perubahan Inventori Kota Tebing Tinggi ADHB dan ADHK 2010



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

3.7. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi wilayah setempat, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar daerah atau luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor ini adalah pembelian oleh badan, awak kendaraan dari wilayah lain yang singgah, dan sebagainya.

Secara harga berlaku (ADHB), total nilai ekspor tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2018 nilai ekspor Kota Tebing Tinggi adalah sebesar Rp 1,97 triliun yang kemudian menyentuh angka lebih Rp 2 triliun sejak tahun 2019. Pada tahun 2022 nilai ekspor dari Kota Tebing Tinggi adalah Rp 2,88 triliun. Secara persentase,

proporsinya terhadap PDRB cenderung berfluktuasi, tetapi nilainya selalu lebih dari 30 persen. Dalam kurun waktu tersebut, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2022 dimana nilai ekspor setara dengan 41,59 persen dari total PDRB .

**Tabel 3.14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Juta Rp)	1 968 157,63	2 141 008,88	2 155 570,57	2 483 299,38	2 882 814,40
b. ADHK (Juta Rp)	1 772 537,49	1 764 060,72	1 685 837,98	1 828 537,56	2 005 194,48
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	35,70	36,14	35,63	39,11	41,59
Pertumbuhan (%)					
Total Ekspor	9,58	-0,48	-4,43	8,46	9,66

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Pertumbuhan riil total ekspor pada tahun 2018 tercatat 9,58 persen. Pada tahun 2019 - 2020 pertumbuhannya berkontraksi secara drastis menjadi -0,48 persen di tahun 2019 dan -4,43 persen di tahun 2020. Kondisi pertumbuhan di tahun 2020 tersebut sekaligus menjadi yang terendah selama 5 tahun terakhir. Hal itu diduga disebabkan oleh permintaan pasar domestik dan luar negeri yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang melanda semua daerah dan manca negara .

3.8. Perkembangan Impor Barang dan Jasa

Pada aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor dari luar Kota Tebing Tinggi. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Kota Tebing Tinggi, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor/ kategori) .

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin tingginya ketergantungan Kota Tebing Tinggi terhadap ekonomi atau produk dari daerah lain. Hal ini didukung fakta bahwa Kota Tebing Tinggi merupakan daerah transit yang perekonomiannya didukung oleh sektor perdagangan dan jasa, sementara komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Tebing Tinggi di luar daerah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.15 berikut menunjukkan bahwa secara total, nilai impor barang dan jasa (ADHB) Kota Tebing Tinggi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 nilai impor barang dan jasa adalah Rp 3,55 triliun yang kemudian naik menjadi di atas Rp 3 triliun sejak tahun 2017. Akhirnya, pada tahun 2020 nilai impor ke Kota Tebing Tinggi mencetak angka Rp 3,80 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Tebing Tinggi kepada wilayah lainnya semakin membesar.

**Tabel 3.15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (Juta Rp)	3 555 966,32	3 790 333,90	3 795 486,35	4 099 147,29	4 537 595,09
b. ADHK (Juta Rp)	2 221 083,01	2 233 053,59	2 161 075,63	2 274 354,66	2 423 867,09
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	64,51	63,98	62,74	64,55	65,47
Pertumbuhan Total Impor	9,45	0,54	-3,2	5,24	6,57

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

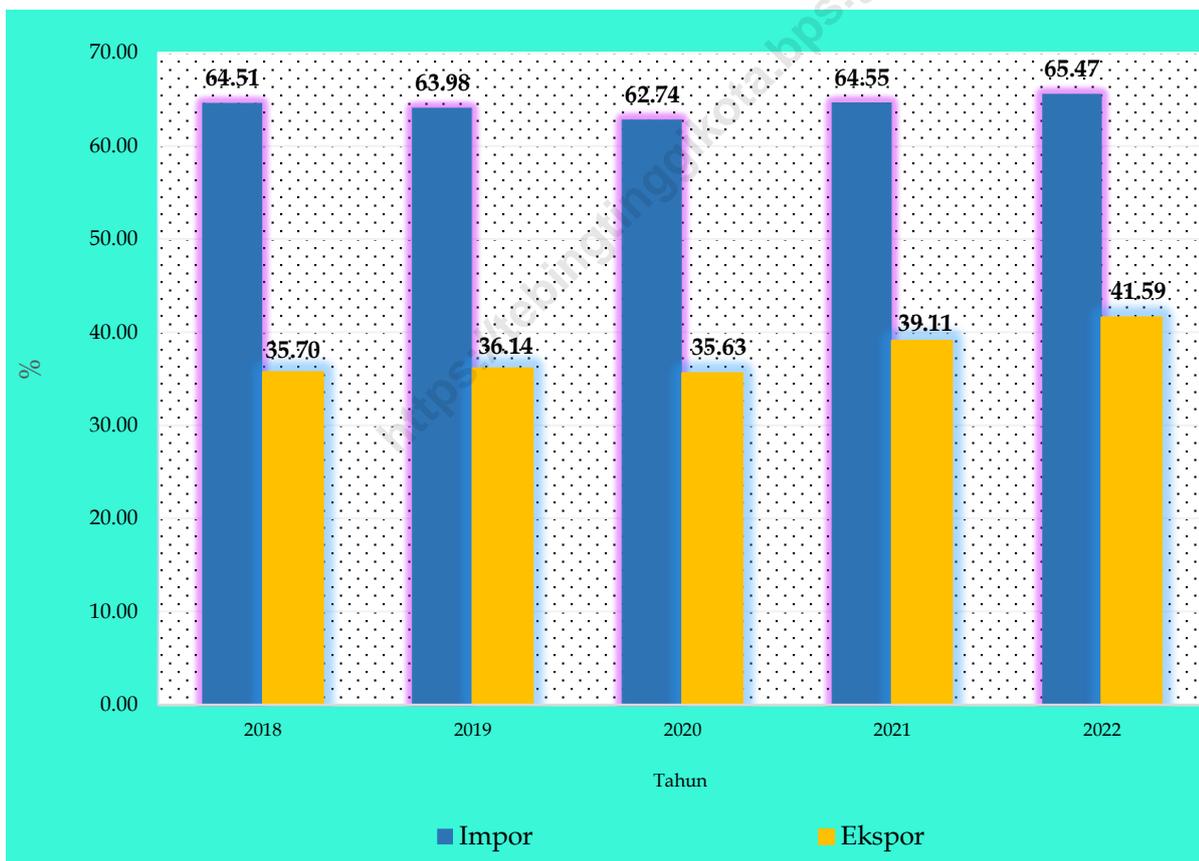
Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Sementara itu, dari segi proporsi impor terhadap PDRB, pada tahun 2018 nilainya sudah mencapai lebih dari setengah PDRB Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2021, proporsi impor barang dan jasa tersebut adalah senilai 65,47 persen dari total PDRB, atau naik sedikit jika dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 64,55 persen. Sementara dari segi pertumbuhannya, nilai impor mengalami fluktuasi yang semula tumbuh 9,45 persen pada

tahun 2018 kemudian turun hingga sempat mencapai 0,54 persen di tahun 2019 dan akhirnya kembali melambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,54 persen di tahun 2019 dan terus berkontraksi hingga menjadi -3,2 persen di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 komponen impor barang dan jasa naik menjadi 5,24 persen dan 6,57 persen seiring dengan mulai pulihnya perekonomian regional , nasional maupun internasional.

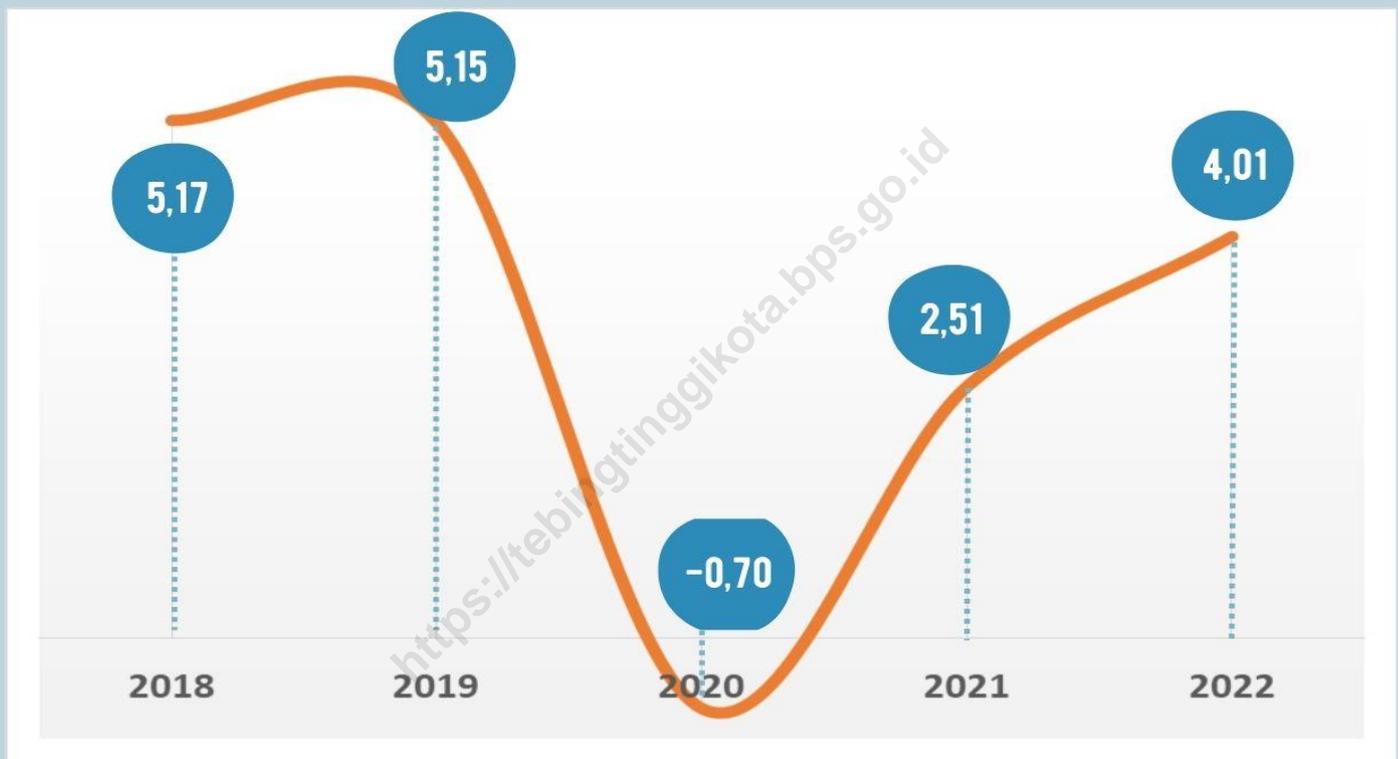
Adapun menurut komposisinya, produk impor yang masuk dari luar daerah Kota Tebing Tinggi lebih banyak daripada produk yang diekspor ke luar Kota Tebing Tinggi. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat baik untuk kebutuhan makanan dan non makanan yang kesemuanya tidak dapat dipenuhi dari dalam kota sendiri. Kondisi tersebut dapat terlihat sebagaimana yang diilustrasikan dalam Gambar 3.5 berikut.

Gambar 3.5. Perkembangan Struktur Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Kota Tebing Tinggi (ADHB), Tahun 2018 - 2022



Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Tebing Tinggi 2018 - 2022 (%)



B A B

4

**PERKEMBANGAN PDRB KOTA
TEBING TINGGI MENURUT
PENGELUARAN 2017-2021**

4.1. PDRB (Nominal)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pendapatan, dan pengeluaran.

Berdasarkan series data PDRB pendekatan pengeluaran, dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita.

**Tabel 4.1. PDRB dan PDRB Perkapita Kota Tebing Tinggi
Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	5 512 517,21	5 924 199,35	6 049 163,10	6 349 945,28	6 931 266,73
- ADHK 2010	3 575 505,22	3 760 504,52	3 954 025,63	4 024 776,92	4 186 309,23
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	33 906,28	35 846,02	35 142,17	36 291,83	38 986,79
- ADHK 2010	23 130,04	23 924,23	22 810,10	23 002,80	23 547,03
- Pertumbuhan (%)	3,95	3,44	-4,66	0,84	2,37
Penduduk					
- Jumlah (Jiwa)	160 686	165 268	172 134	174 969	177,785
- pertumbuhan antar tahun (%)	1,18	1,65	4,15	1,65	1,61

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku (ADHB) di Kota Tebing Tinggi juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1 di atas. PDRB perkapita meningkat dari tahun

2018 dari yang awalnya sebesar Rp 33,91 juta menjadi Rp 35,85 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 turun menjadi 35,14 juta, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi Rp 36,29 juta pada tahun 2022 naik lagi menjadi Rp. 38,99 juta. Kondisi serupa terjadi pada harga konstan (ADHK 2010) nilai PDRB per kapita selama kurun waktu tahun 2018 sampai 2019 meningkat, sedangkan di tahun 2020 PDRB per kapita tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari Rp 23,92 juta tahun 2019 menjadi Rp 22,81 juta pada tahun 2020, dan tahun 2021 dan 2022 meningkat menjadi Rp 23,00 juta dan Rp. 23,55 juta .

Ditinjau dari pertumbuhannya, dapat dikatakan bahwa secara “riil” penduduk di Kota Tebing Tinggi terus mengalami percepatan pertumbuhan secara ekonomi yang cukup stabil sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 pertumbuhannya berkontraksi (tumbuh negatif) -4,66 persen, dan berhasil berakselerasi lagi di tahun 2021 dan 2022 menjadi 0,84 persen dan 2,37 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat penurunan kemampuan ekonomi secara rata-rata per penduduk di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020. Adapun kondisi tersebut adalah sebagai akibat dari pandemi *Covid-19*.

4.2. Perbandingan Pengeluaran PDRB Untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor

Indikator ini berguna untuk menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini, konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam pengeluaran PDRB di Kota Tebing Tinggi (lebih dari 60 persen). Hal tersebut berarti bahwa lebih dari setengah produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kota Tebing Tinggi digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Adapun sebagian lain dari produk barang dan jasa tersebut juga ada yang diekspor. Nilai produksi domestik regional bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap yang digunakan untuk ekspor selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Secara nominal, dapat dilihat pada Tabel 4.2 bahwa nilai PDRB baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk ekspor terus meningkat dari mulai tahun 2018 sampai 2022. Namun demikian, jika keduanya dibandingkan, dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun, nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga selalu lebih besar daripada yang digunakan untuk ekspor.

Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT					
- ADHB (Juta Rp)	3 906 129,87	4 172 534,36	4 194 447,80	4 292 560,01	4 735 946,63
Total Ekspor					
- ADHB (Juta Rp)	1 968 157,63	2 141 008,88	2 155 570,57	2 483 299,38	2 882 814,40
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,98	1,95	1,95	1,73	1,64

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Pada tahun 2018, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dibandingkan dengan yang digunakan untuk ekspor adalah sebesar 1,98 yang berarti bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih banyak hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang digunakan untuk ekspor. Nilai perbandingan tersebut terus mengalami penurunan, hingga akhirnya menjadi senilai 1,64 kali pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa penyediaan (*supply*) domestik sebanyak 1,64 kali lipat saat diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga dibandingkan untuk digunakan sebagai ekspor. Perbedaan mencolok tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tercatat lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3.

Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB

Rasio PDRB yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan informasi mengenai perbandingan antara besar produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga dengan besar produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Tabel 4.3 berikut menyajikan data mengenai hal itu di Kota Tebing Tinggi selama tahun 2018 sampai 2022.

**Tabel 4.3. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT					
- ADHB (Juta Rp)	3 906 129,87	4 172 534,36	4 194 447,80	4 292 560,01	4 735 946,63
Total PMTB					
- ADHB (Juta Rp)	2 026 603,23	2 209 191,21	2 284 372,44	2 408 551,20	2 569 990,04
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,93	1,89	1,84	1,78	1,84

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Secara nominal, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 hingga 2022 nilai PDRB yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga selalu lebih besar dibandingkan yang digunakan untuk PMTB. Pada tahun 2018 perbandingan tersebut tercatat sebesar 1,93 kali. Angka ini terus menurun sehingga pada tahun 2021 menjadi 1,78 kali. Keadaan tersebut berarti bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga 1,78 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan untuk investasi fisik. Namun demikian, dari tahun ke tahun perbandingannya penggunaan keduanya mengecil sehingga dapat diartikan pengeluaran yang digunakan untuk investasi fisik menjadi semakin banyak dibandingkan yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

4.4. Rasio Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah pengeluaran berbagai produk barang dan jasa akhir (baik yang berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRPT), dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi ketiganya sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4 berikut menunjukkan bahwa mayoritas barang dan jasa yang berada di wilayah Kota Tebing Tinggi adalah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Pada tahun 2018, nilai konsumsi akhir oleh ketiga pelaku konsumsi tersebut mencapai 90,08 persen dari total PDRB (setara Rp 5,02 triliun). Nilai konsumsi akhir tersebut

terus meningkat hingga pada tahun 2022 menjadi Rp 5,94 triliun (setara 85,67 persen dari total PDRB). Hal tersebut mengindikasikan begitu signifikannya konsumsi akhir di Kota Tebing Tinggi. Namun demikian, dari segi persentase dapat diketahui bahwa PDRB tahun 2018-2022 yang digunakan untuk konsumsi akhir terus berkurang nilainya atau dengan kata lain berarti penggunaan untuk selain konsumsi akhir (seperti untuk investasi fisik, perubahan inventori, dan perdagangan netto) di Kota Tebing Tinggi menjadi semakin besar dari tahun ke tahun.

Tabel 4.4. Rasio Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	3 906 129,87	4 172 534,36	4 194 447,80	4 292 560,01	4 735 946,63
b. LNPRT	19 546,54	21 883,79	22 262,04	22 493,50	23 592,93
c. Pemerintah	1 095 195,32	1 115 194,88	1 120 310,45	1 175 180,01	1 178 814,65
Jumlah	5 020 871,73	5 309 613,03	5 337 020,29	5 490 233,53	5 938 354,21
PDRB ADHB (Juta Rp)	5 512 517,21	5 924 199,35	6 049 163,10	6 349 945,28	6 931 266,73
Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap Total PDRB (%)	91,08	89,63	88,23	86,46	85,67

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

4.5. Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, melainkan produk tersebut diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk yang diekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, secara umum nilai barang yang diekspor lebih kecil daripada nilai PMTB. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 mulai terjadi perbedaan dimana nilai PMTB berubah menjadi sedikit lebih kecil dibanding nilai ekspor. Hal tersebut terjadi karena nilai ekspor tumbuh dengan sangat signifikan. Apabila ekspor dibandingkan dengan PMTB, diketahui bahwa rasio keduanya mencapai 0,97 pada tahun 2018 dan terus turun pada tahun-tahun berikutnya hingga tercatat menjadi 0,94 pada tahun 2020. Ini berarti bahwa pada 4 tahun belakangan lebih banyak terjadi investasi fisik dibandingkan ekspor di Kota Tebing Tinggi. Kondisi ini kembali berubah pada tahun 2021 dan 2022 dimana nilai ekspor sedikit lebih besar dibandingkan nilai PMTB di tahun yang sama .

**Tabel 4.5 Rasio Ekspor terhadap PMTB
Kota Tebing Tinggi ADHB Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1 968 157,63	2 141 008,88	2 155 570,57	2 483 299,38	2 882 814,40
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	2 026 603,23	2 209 191,21	2 284 372,44	2 408 551,20	2 569 990,04
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,97	0,97	0,94	1,03	1,12

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

4.6. Perbandingan Perbandingan PDRB Terhadap Impor

Rasio PDRB terhadap Impor dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu, data tersebut juga dapat menggambarkan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah lain. Semakin besar rasionya, berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya semakin kecil rasionya berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu kuat.

Rasio PDRB terhadap impor pada tahun 2018 adalah sebesar 1,55 dan terus menurun sampai tahun 2022 menjadi 1,53. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan PDRB terhadap impor sempat semakin mengecil.

**Tabel 4.6. Rasio PDRB terhadap Impor Kota Tebing Tinggi
Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	5 512 517,21	5 924 199,35	6 049 163,10	6 349 945,28	6 931 266,73
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	3 555 966,32	3 790 333,90	3 795 486,35	4 099 147,29	4 537 595,09
Rasio PDRB terhadap Impor	1,55	1,56	1,59	1,55	1,53

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

4.7. Keseimbangan Total Penyediaan Dan Total Permintaan

Indikator ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui nilai perbandingan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Berdasarkan Tabel 4.7, terlihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir di Kota Tebing Tinggi, lebih dari sepertiganya harus didatangkan dari luar kota. Hal tersebut tercermin dari besarnya persentase impor yakni 39,21 persen pada tahun 2018 dan terus naik hingga menjadi 39,02 persen pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 persentasenya menurun menjadi 38,55 persen, selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 angka tersebut naik kembali menjadi 39,23 persen dan 39,56 persen. Besarnya nilai impor ini sejalan dengan semakin meningkatnya total permintaan domestik (*demand*) di Kota Tebing Tinggi dari yang semula bernilai Rp 9,07 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 11,47 triliun pada tahun 2022.

**Tabel 4.7. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan (PDRB - ADHB)					
Total (Juta Rp)	5 512 517,21	5 924 199,35	6 049 163,10	6 349 945,28	6 931 266,73
%	60,79	60,98	61,45	60,77	60,44
Impor (ADHB)					
Total (Juta Rp)	3 555 966,32	3 790 333,90	3 795 486,35	4 099 147,29	4 537 595,09
%	39,21	39,02	38,55	39,23	39,56
Permintaan Akhir (ADHB)					
Total (Juta Rp)	9 068 483,53	9 714 533,25	9 844 649,45	10 449 092,57	11 468 861,82
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Selain itu, pada saat yang bersamaan nilai penyediaan (*supply*) dari domestik Kota Tebing Tinggi sendiri tidak bertambah sebanyak peningkatan permintaan akhir (*demand*), sehingga perlu dilakukan impor. Nilai penyediaan yang berasal dari dalam Kota Tebing Tinggi sendiri hanya meningkat dari Rp 5,51 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 6,93 triliun pada tahun 2022 yang mana tidak setara dengan nilai permintaan (*demand*) seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

4.8. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar wilayah (non-residen) serta dari daerah lain dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”. Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, sedangkan jika yang terjadi adalah sebaliknya maka disebut defisit.

Adapun jika dilihat dari arus uang yang keluar masuk, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka akan terjadi aliran devisa masuk. Sebaliknya jika posisi arus

uang adalah defisit, maka yang akan terjadi adalah aliran devisa keluar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya dapat dijelaskan oleh nilai ekspor neto tersebut.

Sebagai gambaran posisi neraca perdagangan, dapat dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor (meskipun kajian tersebut biasanya hanya dapat dilakukan secara total karena tidak dapat merefleksikan perbandingan per jenis komoditas, harga, maupun kuantum). Apabila nilai rasionya lebih besar dari 1 (satu) maka artinya nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) maka berarti nilai impornya yang lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Selama periode 2018-2022, rasio perdagangan barang dan jasa di Kota Tebing Tinggi dengan luar wilayahnya selalu menunjukkan nilai lebih kecil daripada 1. Hal ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan barang dan jasa Kota Tebing Tinggi selalu dalam posisi defisit atau dengan kata lain nilai produk barang dan jasa yang diimpor lebih besar daripada barang dan jasa yang diekspor. Hal tersebut menyebabkan adanya aliran devisa keluar.

**Tabel 4.8. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1 968 157,63	2 141 008,88	2 155 570,57	2 483 299,38	2 882 814,41
Nilai Impor (ADHB) (Juta Rp)	3 555 966,32	3 790 333,90	3 795 486,35	4 099 147,29	4 537 595,09
Net Ekspor (X - M) (Juta Rp)	(1 587 808,69)	(1 649 325,02)	(1 639 915,78)	(1 615 847,91)	(1 654 780,69)
Rasio Ekspor thdp Impor	0,55	0,56	0,57	0,61	0,64

Angka Sementara

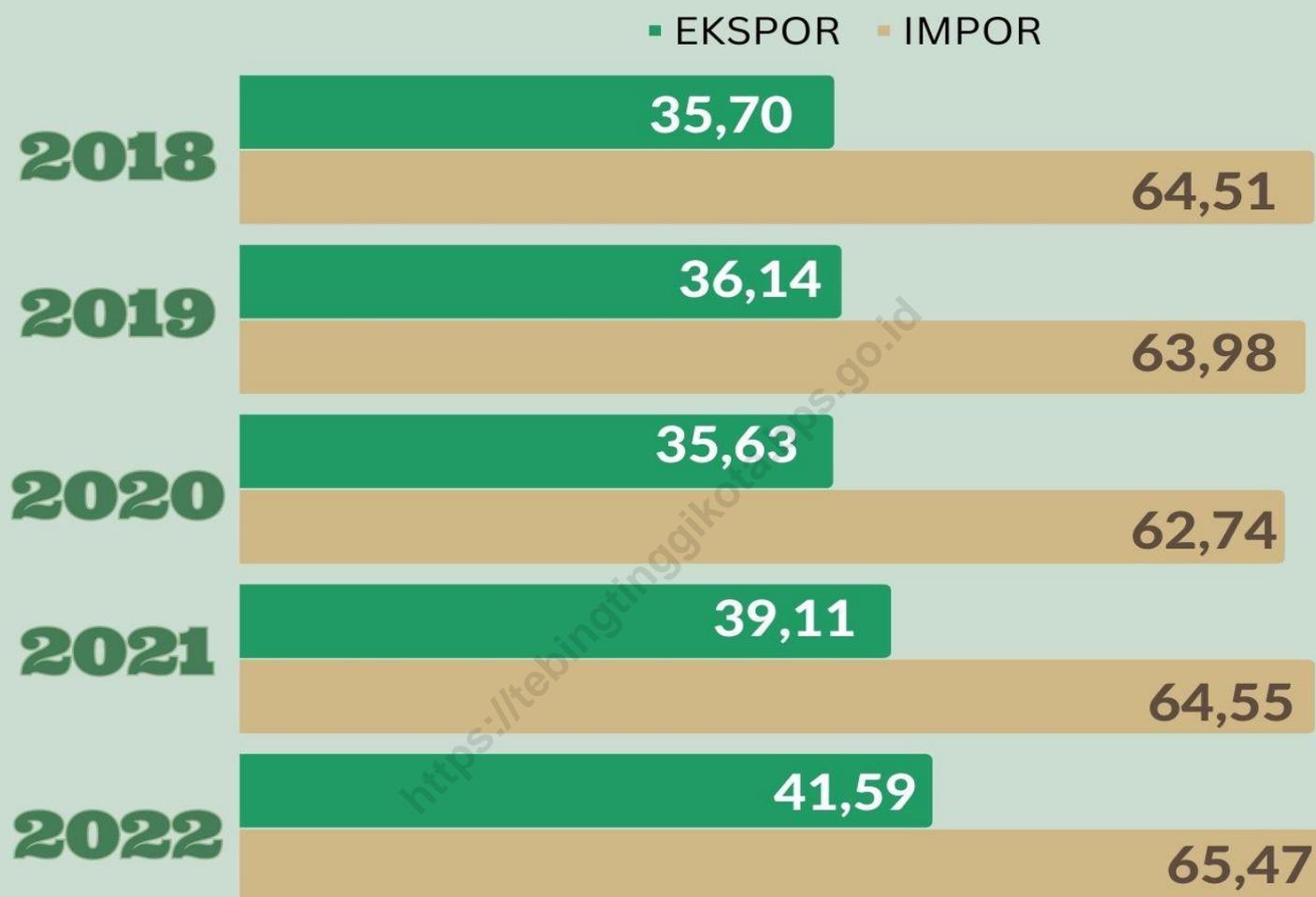
**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi

Pada tahun 2018, nilai impor di Kota Tebing Tinggi lebih banyak Rp 1,58 triliun dibanding nilai eksportnya, atau dengan kata lain rasio keduanya adalah 0,55 persen. Pada tahun 2022, selisih kedua nilai tersebut meningkat yaitu 0,64 persen tetapi secara nominal (ADHB) nilai ekspor neto nya membengkak menjadi minus Rp 1,65 triliun. Peningkatan nilai ekspor neto tersebut menjadi indikasi bahwa defisit neraca perdagangan di Kota Tebing Tinggi semakin bertambah secara nominal sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

**PERKEMBANGAN STRUKTUR
EKSPOR DAN IMPOR BARANG DAN JASA
KOTA TEBING TINGGI (ADHB), 2018 - 2022 (%)**



B A B

5

P E N U T U P

PENUTUP

1. Informasi PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Tebing Tinggi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri) agar hasil analisis yang disajikan lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 s.d 2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan disini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Tebing Tinggi terhadap ekonomi dan daerah lain.

B A B

6

TABEL - TABEL

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

Tabel 6.1
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHB
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) 2018 – 2022

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 906 129,87	4 172 534,36	4 194 447,80	4 292 560,01	4 735 946,63
	a. Makanan Minuman dan Rokok	2 392 235,71	2 553 906,11	2 610 912,18	2 685 701,63	2 988 068,81
	b. Pakaian dan Alas Kaki	47 110,99	50 081,67	51 939,48	53 504,20	57 629,20
	c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	338 610,56	362 423,21	363 192,46	369 823,04	388 523,37
	d. Kesehatan dan Pendidikan	133 622,93	144 101,76	145 222,09	147 293,61	151 380,00
	e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	761 090,20	817 455,66	788 962,01	795 347,89	889 018,88
	f. Hotel dan Restoran	188 825,97	199 237,88	189 339,51	194 680,79	210 542,23
	g. Lainnya	44 633,49	45 328,06	44 880,07	46 208,86	50 784,14
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19 546,54	21 883,79	22 262,04	22 493,50	23 592,93
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 095 195,32	1 115 194,88	1 120 310,45	1 175 180,01	1 178 814,65
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 026 603,23	2 209 191,21	2 284 372,44	2 408 551,20	2 569 990,04
	a. Bangunan	1 667 179,55	1 816 964,75	1 864 741,23	1 967 030,78	2 088 734,63
	b. Non-Bangunan	359 423,68	392 226,46	419 631,21	441 520,42	481 255,41
5	Perubahan Inventori	52 850,95	54 720,14	67 686,16	67 008,46	77 703,16
6	Ekspor	1 968 157,63	2 141 008,88	2 155 570,57	2 483 299,38	2 882 814,40
7	Impor	3 555 966,32	3 790 333,90	3 795 486,35	4 099 147,29	4 537 595,09
	PDRB	5 512 517,21	5 924 199,35	6 049 163,10	6 349 945,28	6 931 266,73

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6.2

**Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi ADHK 2010
Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2018 - 2022**

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2 486 013,74	2 607 930,23	2 576 322,76	2 594 039,78	2,682,875.26
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1 495 073,60	1 575 521,56	1 577 961,25	1 591 428,40	1,649,328.17
	b. Pakaian dan Alas Kaki	40 785,72	41 883,80	41 723,16	41 984,96	43,441.48
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	204 583,12	207 716,01	208 539,37	209 190,72	213,123.66
	d. Kesehatan dan Pendidikan	86 749,18	87 994,30	87 536,99	87 883,18	88,699.74
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	450 394,71	480 071,22	458 307,08	461 339,11	476,970.77
	f. Hotel dan Restoran	174 525,80	180 584,36	169 187,58	169 087,35	176,914.09
	g. Lainnya	33 901,62	34 158,97	33 067,32	33 126,05	34,397.35
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	16 048,16	17 579,57	17 730,69	17 664,02	18,276.99
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	624 135,80	625 956,60	623 159,34	641 157,01	632 571,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 040 239,95	1 127 603,19	1 132 060,23	1 167 699,32	1 218 165,43
	a. Bangunan	851 045,94	923 495,28	920 456,72	946 151,19	987 010,32
	b. Non-Bangunan	189 194,01	204 107,91	211 603,51	221 548,13	231 155,11
5	Perubahan Inventori	42 612,39	43 948,91	52 357,99	50 033,88	53 092,33
6	Ekspor	1 772 537,49	1 764 060,72	1 685 837,98	1 828 537,56	2 005 194,48
7	Impor	2 221 083,01	2 233 053,59	2 161 075,63	2 274 354,66	2 423 867,09
	PDRB	3 760 504,52	3 954 025,63	3 926 393,36	4 024 776,92	4 186 309,23

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6.3
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi
ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70,86	70,43	69,34	67,60	68,33
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,40	43,11	43,16	42,29	43,11
	b. Pakaian dan Alas Kaki	0,85	0,85	0,86	0,84	0,83
	c. Perumahan, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,14	6,12	6,00	5,82	5,61
	d. Kesehatan dan Pendidikan	2,42	2,43	2,40	2,32	2,18
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,81	13,80	13,04	12,53	12,83
	f. Hotel dan Restoran	3,43	3,36	3,13	3,07	3,04
	g. Lainnya	0,81	0,77	0,74	0,73	0,73
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,35	0,37	0,37	0,35	0,34
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	19,87	18,82	18,52	18,51	17,01
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,76	37,29	37,76	37,93	37,08
	a. Bangunan	30,24	30,67	30,83	30,98	30,13
	b. Non-Bangunan	6,52	6,62	6,94	6,95	6,94
5	Perubahan Inventori	0,96	0,92	1,12	1,06	1,12
6	Ekspor	35,70	36,14	35,63	39,11	41,59
7	Impor	64,51	63,98	62,74	64,55	65,47
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Tabel 6.4

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tebing Tinggi
ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022**

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,16	4,90	-1,21	0,69	3,42
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,90	5,38	0,15	0,85	3,64
	b. Pakaian dan Alas Kaki	4,29	2,69	-0,38	0,63	3,47
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,82	1,53	0,40	0,31	1,88
	d. Kesehatan dan Pendidikan	1,71	1,44	-0,52	0,40	0,93
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,10	6,59	-4,53	0,66	3,39
	f. Hotel dan Restoran	3,24	3,47	-6,31	-0,06	4,63
	g. Lainnya	2,98	0,76	-3,20	0,18	3,84
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,18	9,54	0,86	-0,38	3,47
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,52	0,29	-0,45	2,89	(1,34)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,40	8,40	0,40	3,15	4,32
	a. Bangunan	9,93	8,51	-0,33	2,79	4,32
	b. Non-Bangunan	2,01	7,88	3,67	4,70	4,34
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	9,58	-0,48	-4,43	8,46	9,66
	Impor	9,45	0,54	-3,22	5,24	6,57
	PDRB	5,17	5,15	-0,70	2,51	4,01

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6.5
Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kota Tebing Tinggi ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 ^{*)}	2022 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	243,53	260,13	261,50	267,62	295,26
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	276,45	295,13	301,72	310,36	345,30
	b. Pakaian dan Alas Kaki	132,96	141,34	146,58	151,00	162,64
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	207,17	221,74	222,21	226,27	237,71
	d. Kesehatan dan Pendidikan	170,78	184,17	185,60	188,26	193,47
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	271,34	291,44	281,28	283,55	316,95
	f. Hotel dan Restoran	123,43	130,23	123,76	127,25	137,62
	g. Lainnya	159,16	161,64	160,04	164,78	181,09
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	155,48	174,07	177,08	178,92	187,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	258,08	262,80	264,00	276,93	277,79
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	282,37	307,82	318,29	335,59	358,09
	a. Bangunan	304,91	332,30	341,04	359,74	382,00
	b. Non-Bangunan	210,29	229,49	245,52	258,33	281,57
5	Perubahan Inventori	64,03	66,29	82,00	81,18	94,14
6	Ekspor	291,25	316,83	318,98	367,48	426,60
7	Impor	335,49	357,60	358,09	386,73	428,10
	PDRB	224,36	241,12	246,20	258,44	282,10

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6.6

**Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto
Kota Tebing Tinggi ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022**

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	154,99	162,59	160,62	161,72	167,26
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	172,77	182,07	182,35	183,91	190,60
	b. Pakaian dan Alas Kaki	115,11	118,20	117,75	118,49	122,60
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	125,17	127,09	127,59	127,99	130,40
	d. Kesehatan dan Pendidikan	110,87	112,46	111,88	112,32	113,36
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	160,57	171,15	163,39	164,47	170,05
	f. Hotel dan Restoran	114,08	118,04	110,59	110,52	115,64
	g. Lainnya	120,89	121,81	117,92	118,13	122,66
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	127,65	139,83	141,04	140,50	145,38
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	147,08	147,51	146,85	151,09	149,07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	144,94	157,11	157,73	162,70	169,73
	a. Bangunan	155,65	168,90	168,34	173,04	180,51
	b. Non-Bangunan	110,69	119,42	123,81	129,62	135,25
5	Perubahan Inventori	51,63	53,25	63,43	60,62	64,32
6	Ekspor	262,30	261,05	249,47	270,59	296,73
7	Impor	209,55	210,68	203,89	214,57	228,68
PDRB		153,05	160,93	159,80	163,81	170,38

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 6.7
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	157,12	159,99	162,81	165,48	176,53
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	160,01	162,10	165,46	168,76	181,17
	b. Pakaian dan Alas Kaki	115,51	119,57	124,49	127,44	132,66
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	165,51	174,48	174,16	176,79	182,30
	d. Kesehatan dan Pendidikan	154,03	163,76	165,90	167,60	170,67
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	168,98	170,28	172,15	172,40	186,39
	f. Hotel dan Restoran	108,19	110,33	111,91	111,14	119,01
	g. Lainnya	131,66	132,70	135,72	139,49	147,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	121,80	124,48	125,56	127,34	129,09
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	175,47	178,16	179,78	183,29	186,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	194,82	195,92	201,79	206,26	210,97
	a. Bangunan	195,90	196,75	202,59	207,90	211,62
	b. Non-Bangunan	189,98	192,17	198,31	199,29	208,20
5	Perubahan Inventori	124,03	124,51	129,28	133,95	146,35
	Ekspor	111,04	121,37	127,86	135,81	143,77
7	Impor	160,10	169,74	175,63	180,23	187,20
	PDRB	146,59	149,83	154,06	157,77	165,57

** Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Tabel 6.8

**Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto
Kota Tebing Tinggi Menurut Pengeluaran, 2018 - 2022**

No	Komponen Penggunaan	2018	2019	2020	2021 [*]	2022 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,49	1,83	1,76	1,64	6,68
	a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,01	1,31	2,07	1,99	7,35
	b. Pakaian dan Alas Kaki	7,55	3,52	4,11	2,37	4,10
	c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,18	5,42	-0,18	1,51	3,12
	d. Kesehatan dan Pendidikan	2,91	6,32	1,30	1,03	1,83
	e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,65	0,77	1,10	0,15	8,11
	f. Hotel dan Restoran	2,46	1,97	1,43	2,88	3,36
	g. Lainnya	-0,39	0,79	2,28	2,78	5,84
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,30	2,20	0,86	1,42	1,37
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,20	1,53	0,91	1,95	1,67
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,60	0,56	3,00	2,22	2,28
	a. Bangunan	3,58	0,43	2,97	2,62	1,79
	b. Non-Bangunan	3,52	1,15	3,20	0,49	4,47
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	-0,13	9,31	5,35	6,21	5,86
7	Impor	2,07	6,02	3,47	2,62	3,87
	PDRB	2,31	2,21	2,83	2,41	4,94

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://teknologiinggika.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, *PDRB Menurut Penggunaan*, berbagai seri, Tebing Tinggi: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, *PDRB Menurut Penggunaan*, berbagai seri, Medan : BPS.

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, *Tebing Tinggi Dalam Angka*, berbagai seri, Tebing Tinggi : BPS.

<https://tebingtinggikota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TEBING TINGGI

Jl. Gunung Tambura, Tebing Tinggi 20614
Telp.: (0621)21733, E-mail: bps1274@bps.go.id
Homepage : <http://tebingtinggikota.bps.go.id>

ISSN 2655-1241



9 772655 124004